



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



RANCANGAN AWAL RENCANA STRATEGIS (RANWAL RENSTRA 2025-2029)



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025-2029 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Kabupaten Lampung Barat dan bersifat indikatif.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah khususnya dalam bidang urusan Kesatuan Bangsa dan Politik. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Selanjutnya Renstra ini harus dijabarkan dan dilaksanakan secara konsisten dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD sekaligus untuk menyusun RKA-SKPD.

Liwa, April 2025

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



BURLIANTO EKA PUTRA, S.H.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197109241998031005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Landasan Hukum	2
3. Maksud dan Tujuan.....	3
4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	6
1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	6
1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat	6
1.2. Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat	14
1.3. Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026	21
1.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025-2029.....	26
1.5. Kelompok Sasaran Layanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat.....	30
2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	31
2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat	31
2.2. Isu-Isu Strategis.....	33
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	34
1. Tujuan Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat	38

2. Sasaran Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat.....	38
3. Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Perangkat Tahun 2025-2029.....	41
4. Arah Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Perangkat Tahun 2025-2029	41
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA	
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	43
1. Program	43
2. Kegiatan.....	49
3. Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif	52
4. Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	67
5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat.....	67
6. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	69
BAB V PENUTUP	70



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2026–2030 disusun sebagai pedoman arah pembangunan dan pelaksanaan tugas serta fungsi perangkat daerah dalam bidang kesatuan bangsa dan politik. Penyusunan Renstra ini menjadi bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Dalam menghadapi dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara yang semakin kompleks, peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi semakin strategis. Tantangan seperti potensi disintegrasi bangsa, konflik sosial, radikalisme, intoleransi, serta menurunnya partisipasi politik masyarakat memerlukan respons yang cepat, tepat, dan terukur dari pemerintah daerah, khususnya lembaga yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Kabupaten Lampung Barat sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki keragaman sosial, budaya, dan politik yang menjadi kekuatan sekaligus tantangan dalam menjaga stabilitas daerah. Oleh karena itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dituntut untuk menyusun strategi yang mampu menjawab tantangan tersebut melalui kebijakan yang berorientasi pada peningkatan wawasan kebangsaan, pemantapan ideologi Pancasila, penguatan partisipasi politik masyarakat, serta pencegahan konflik sosial di tingkat lokal.

Penyusunan Renstra ini juga dimaksudkan untuk merespons arah kebijakan nasional dan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025–2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen perencanaan teknokratik, tetapi



juga sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan sinergi antara kebijakan nasional dan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Melalui Renstra ini, diharapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat dapat lebih terarah dalam menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung tercapainya kehidupan masyarakat yang harmonis serta terciptanya stabilitas politik di wilayah Kabupaten Lampung Barat dalam periode lima tahun ke depan.

2. Landasan Hukum

Landasan hukum sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2026-2030 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Amandemen Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan dan Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan secara teknis diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008;



- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancangan Pembangunan Jangka menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah;
- g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah;
- h. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah;
- i. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
- k. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat disusun mengacu pada visi dan misi Kabupaten Lampung Barat sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 Kabupaten Lampung Barat, sekaligus berfungsi sebagai



dokumen perencanaan yang mengakomodasi berbagai aspirasi yang ada. Disamping itu penyusunan Renstra ini juga dimaksudkan sebagai upaya untuk mengarahkan semua sumber daya yang dimiliki dalam pelaksanaan program-program yang ada dan untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

a. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan strategis yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Renstra ini menjadi dasar penjabaran visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan yang bersifat strategis, terukur, dan terarah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

b. Tujuan

1. Menetapkan arah kebijakan dan strategi pembangunan dibidang kesatuan bangsa dan politik yang sejalan dengan RPJPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025–2045 dan RPJMD Tahun 2025–2029.
2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mendukung stabilitas politik, ketahanan ideologi, serta kehidupan masyarakat yang harmonis.
3. Menyelaraskan program dan kegiatan lintas sektor serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dalam bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial.
4. Memberikan arah yang jelas dalam perencanaan dan penganggaran sehingga seluruh kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat dapat dilaksanakan secara terukur, terencana, dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik, serta memperkuat wawasan kebangsaan, nilai-nilai Pancasila, dan semangat persatuan dalam keberagaman.



4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025–2029 disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - a. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
 - b. Sumber Daya Perangkat Daerah
 - c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - d. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
 - e. Kelompok sasaran layanan.
2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
 - b. Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Tujuan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029
2. Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029
3. Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Perangkat Tahun 2025–2029
4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Perangkat Tahun 2025–2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

1. Uraian Program
2. Uraian Kegiatan
3. Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif
4. Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah
5. Target Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra perangkat daerah Tahun 2025–2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.
6. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025–2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat pada rencana strategis periode sebelumnya merupakan hasil dari berbagai upaya yang telah dilaksanakan oleh perangkat daerah dan akan menjadi gambaran pelayanan serta diperlukan sebagai panduan dalam menyusun kebijakan strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025–2029 terutama untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan organisasi agar rumusan program dan kegiatan yang dibuat dapat mencapai tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik secara efektif dan efisien.

Gambaran pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat tahun 2025–2029 dijelaskan melalui analisis indikator capaian kinerja pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi, sumber daya yang dimiliki, capaian-capaian penting yang telah dihasilkan periode sebelumnya, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dan dinilai perlu diatasi pada periode yang akan datang.

1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat

Berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat yaitu membantu bupati dalam melaksanakan tugas dibidang kesatuan bangsa dan politik. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;



- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik;

Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat terdiri dari :

1. Kepala Badan

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerinah yang menjadi kewenangan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan dilingkungan Badan yang menjadi tugas dan kewenangannya:
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik diwilayah kabupaten sesuai dengan kelentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan idiologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi sosial dan budaya pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik social diwilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan koordinasi dibidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekotiom, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penaganan konllik sosial diwilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi pemeliharaan kelahanan ekonomi, sosial dan budaya,



pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lamnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial diwilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

- g. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten;
- h. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan kesatuan bangsa dan politik;
- l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan; dan
- j. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundangundangan

2. Sekretaris,

Sekretaris meupakan pimpinan Sekretariat Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dengan menjalankan tugas meniberikan pelayanan administratif dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi dan penyusunan program dan anggaran dilingkungan badan;
- b. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan dilingkungan badan;
- c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan dilingkungan badan;
- d. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset dilingkungan badan;
- e. Pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara dilingkungan badan;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang dibenkan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya Sekretaris Badan membawahi :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Kepaia Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis dibidang sub bagian program anggaran dan keuangan.



Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah rangka, asset serta pengelolaan kepegawaian;
- b. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan; dan
- c. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan.

2) Jabatan Fungsional.

Pejabat fungsional yang menyelenggarakan kegiatan untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat.

3. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama.

Bidang ini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dengan menjalankan tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi. sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja dibidang ideologi, wawasan kebangsaan bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kabupaten;



- b. Perumusan kebijakan teknis dibidang ideologi, wawaasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkolika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan diwilayah kabupateh;
- c. Pelaksanaan kebijkakan dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fesilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kabupaten;
- d. Pelaksanaan koordinasi dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kabupaten;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan ibidang idedogi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa., pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan diwilayah kabupaten; dan
- f. Pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelakasanan penyelenggaraan tugas dan fungsi tersebut kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat dibantu oleh staf dan pejabat fungsional.

4. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.

Bidang ini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dengan menjalankan tugas sebagian tugas Badan Kesaatuan Bangsa dan Politik dibidang Pendidikan politik, etika



budaya politik, peningkatan demokrasi fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dari partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasildasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten;
- c. Pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawaaan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten; dan



- f. Pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan tugas dan fungsi tersebut kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat dibantu oleh staf dan pejabat fungsional.

5. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

Bidang ini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dengan menjalankan tugas sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik..

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat mempunyai fungsi :

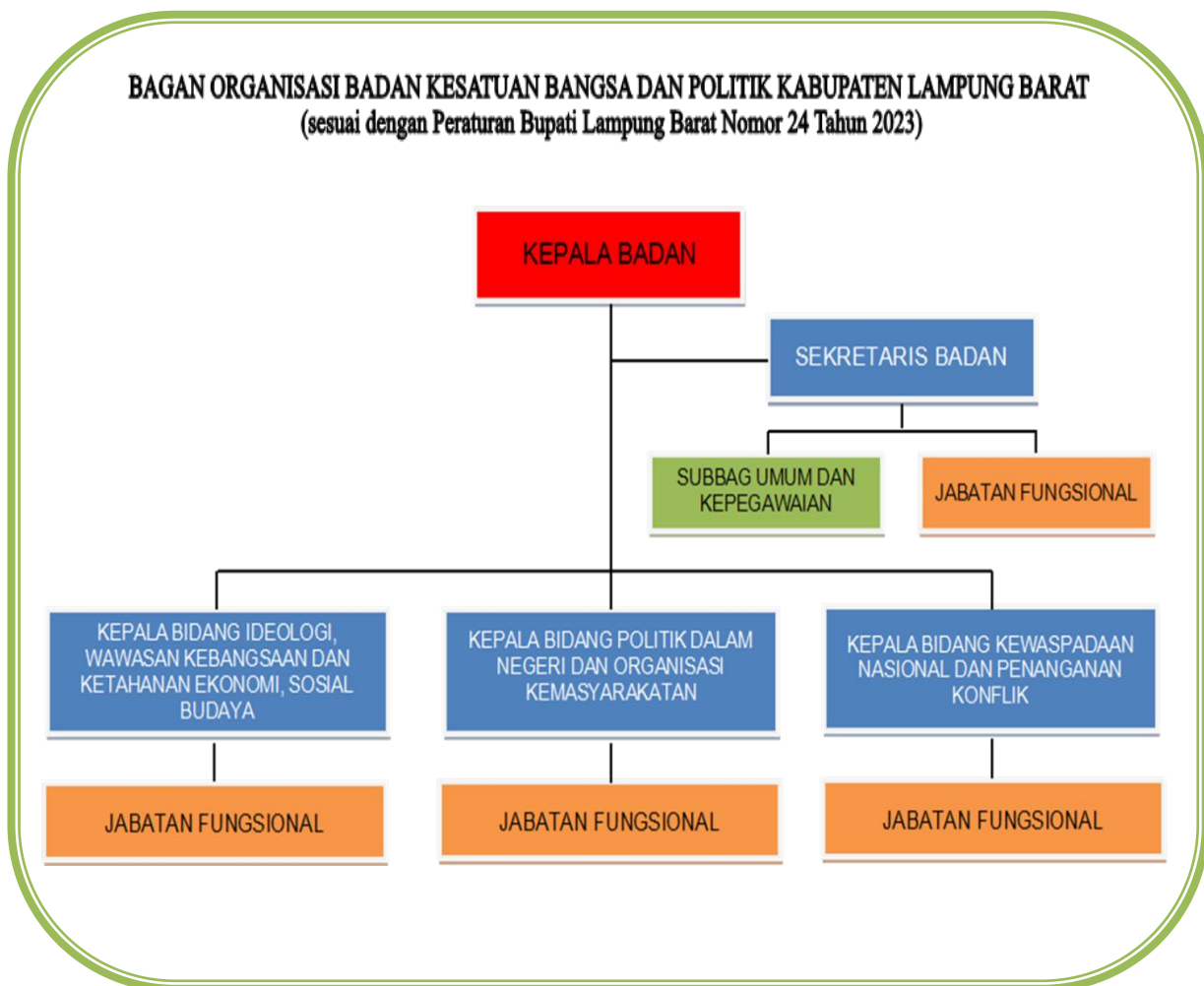
- a. penyusunan program kerja dibidang kewaspadaan dini kerjasama intelijen pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di wilayah kabupaten;
- b. penyusunan bahan perumusan kebijakan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten;
- c. pelaksanaan kebijakan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten;
- d. pelaksanaan koordinasi dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing,



**RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
BADAN KESBANGPOL KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

- kewaspadaan perbatasan antar Negara fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di wilayah kabupaten;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen.pemantauan orang asing, tenaga tenaga asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten; dan
 - f. Pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan tugas dan fungsi tersebut kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat dibantu oleh staf dan pejabat fungsional.





1.2. Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat

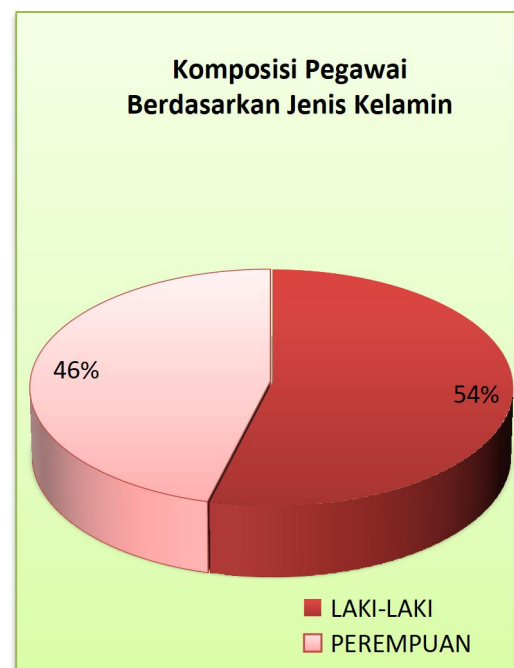
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, baik itu sumber daya manusia, aset, maupun modal. Berikut uraian singkat tentang sumber daya yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat sampai dengan Desember 2024.

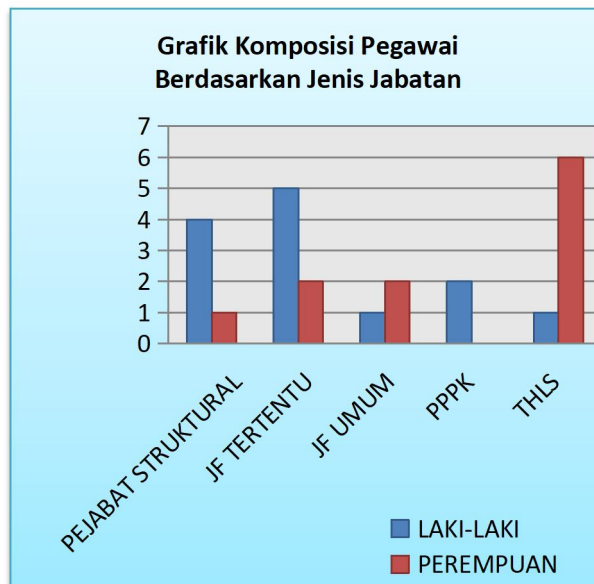
1.2.a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur yang paling penting dalam organisasi, sebab manusialah yang menggerakkan seluruh sumber daya yang ada dalam suatu organisasi. Melihat tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat sebagai instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi membantu melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam bidang kesatuan bangsa dan politik maka perlu didukung dengan ketersediaan SDM Aparatur yang memadai.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat memiliki sumberdaya manusia dalam jumlah dan kapasitas yang terbatas.

Pada akhir tahun 2024 terdapat 24 orang pegawai terdiri atas PNS sebanyak 15 orang, PPPK 2 orang dan Tenaga Harian Lepas Sukarela (THLS) sebanyak 7 orang. Sedangkan bila dilihat berdasarkan jenis kelaminnya jumlah antara pegawai laki-laki dan pegawai perempuan yaitu sebanyak 54% dan sisanya sebanyak 46% merupakan pegawai perempuan atau Pegawai Laki laki 13 orang, dan wanita sebanyak 11 orang.

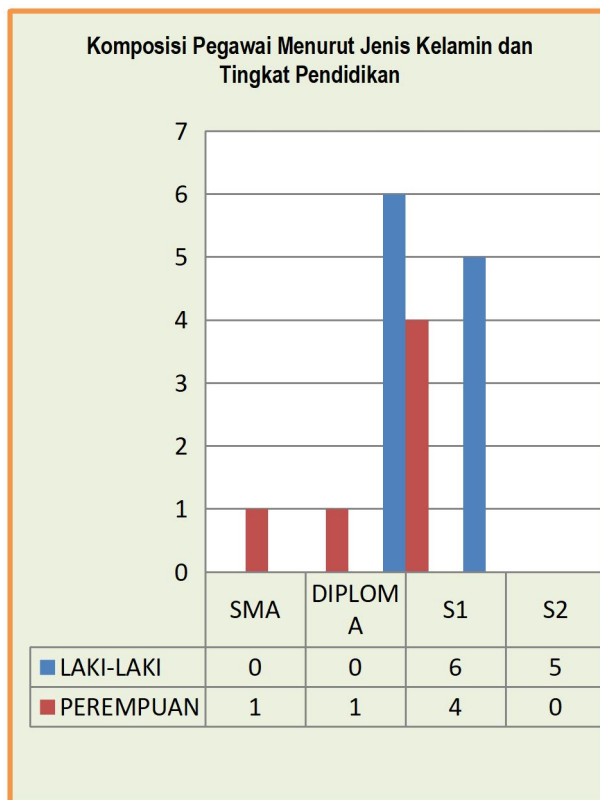
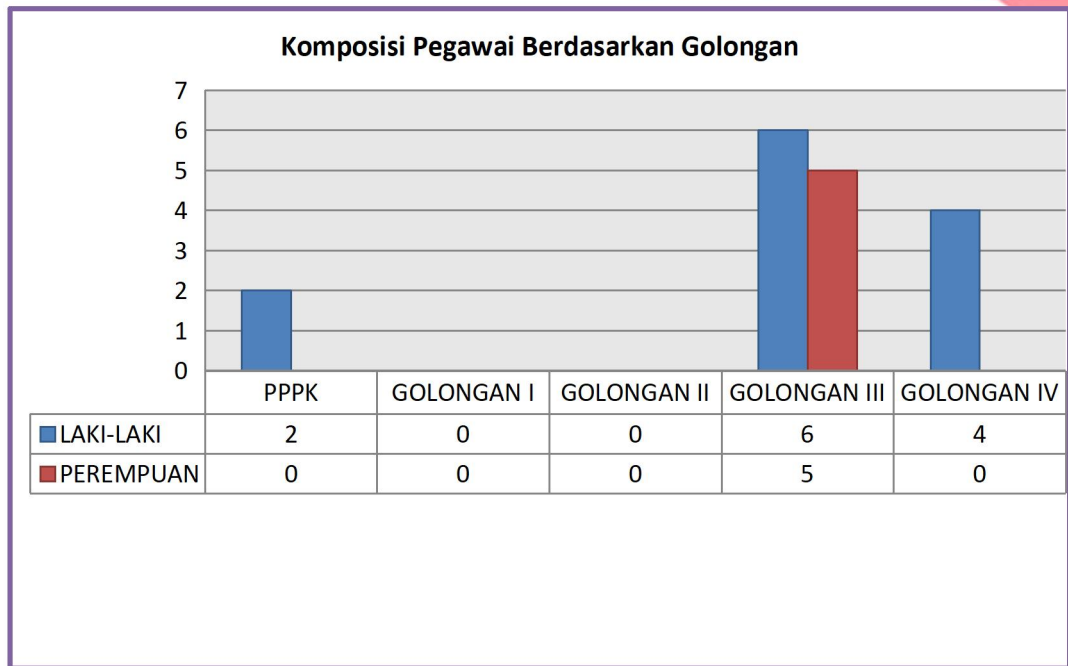




Dari seluruh jumlah pegawai tersebut sebanyak 5 orang pejabat struktural, 7 orang fungsional tertentu dan 3 orang staf fungsional umum, 2 orang PPPK dan 7 orang Tenaga Harian Lepas Sukarela (THLS) dengan komposisi 20% pejabat struktural dan 80% non struktural.

Komposisi Pegawai Menurut Jabatan Struktural dan Non Struktural Tahun 2024

NO.	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH	STATUS PENGISIAN JABATAN
1	Kepala Badan Kesbangpol	1 orang	ada
2	Sekretaris Badan Kesbangpol	1 orang	ada
3	Kepala Bidang	2 orang	
	➤ Kabid. Poldagri dan Ormas		Tidak ada
	➤ Kabid. IWK dan KESBA	1 orang	ada
	➤ Kabid. KNPk	1 orang	ada
4	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	1 orang	ada
5	Pejabat Fungsional Tertentu		
	➤ JF Perencana Ahli Muda	1 orang	ada
	➤ JF Analis Kebijakan Ahli Muda	6 orang	ada
6	PPPK	2 orang	ada
7	Fungsional Umum	3 orang	ada
8	THLS	7 orang	ada



Bila dilihat berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa pegawai laki-laki lebih banyak menduduki jabatan struktural dibanding perempuan. Selain itu pada tingkat eselon yang semakin tinggi menunjukkan bahwa komposisi perempuan yang menduduki jabatan semakin mengecil. Beberapa upaya perlu dilakukan untuk mendorong pengembangan karir perempuan sehingga semakin terbuka kesempatan

bagi perempuan untuk menduduki posisi strategis untuk berperan lebih luas dalam pengambilan kebijakan.

Bila pegawai dipilah menurut pendidikan dan jenis kelamin menunjukkan bahwa pendidikan tingkat SMA sampai dengan pendidikan



Diploma masih didominasi oleh Perempuan, sedangkan pada tingkat pendidikan tinggi S1 sampai dengan S2 jumlah pegawai laki-laki masih mendominasi dibanding jumlah pegawai perempuan.

Sedangkan apabila data dipilah menurut pendidikan pada tiap golongan menunjukkan bahwa PNS pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat sebagian terbesar adalah golongan III dengan pendidikan S1 sebanyak 45,16% Rincian detail pegawai menurut pendidikan dan golongan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Daftar Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2024

NO	PENDIDIKAN	GOL IV	GOL III	GOL II	PPPK	THLS
1	SLTA	-	1	-	-	2
2	Diploma III	-	-	-	-	1
3	Sarjana	1	9	-	2	4
4	Pasca Sarjana	3	1	-	-	-
	JUMLAH	4	11	-	2	7

Berdasarkan data pegawai diatas dapat kita ketahui bahwa jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat masih sangat terbatas, meskipun demikian dengan keterbatasan jumlah pegawai tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasi secara baik serta dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan hal ini tidak lepas dari kerja sama seluruh pihak baik dari lingkungan internal maupun eksternal organisasi.

1.2.b. Sumber Daya Aset/Modal

Selain sumber daya manusia, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya juga membutuhkan dukungan sarana dan prasarana kerja (aset/modal). Jenis sarana dan prasarana kerja yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruangan kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi. Ruang kerja Badan Kesatuan Bangsa



dan Politik satu bangunan gedung yang terletak di Kompleks Perkantoran Pemda Lampung Barat Jl. Mawar Nomor 2 Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat. Bangunan gedung yang menjadi ruang kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat masih membutuhkan pengembangan baik dari penataan ruangan maupun penambahan kapasitas ruangan meskipun saat ini berkondisi baik dan dapat digunakan untuk kegiatan operasional kantor.

Adapun untuk sarana dan prasarana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat berupa kendaraan dinas yang digunakan untuk operasional sebanyak 2 unit kendaraan roda empat dan 3 unit kendaraan roda dua serta terdapat sarana prasarana lainnya sebagaimana table berikut :

Daftar Sarana dan Prasarana
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat

No	Nama Barang	Ukuran/ CC	Tahun Pembuatan/ Pembelian	Jumlah	Ket
1	2	3	4	5	6
1	Mobil Toyota Rush	1495	2012	1 unit	Baik
2	Mobil Toyota Kijang Kapsul	1781	2003	1 unit	Baik
3	Motor Honda CB150 Verza CW	150	2021	1 Unit	Baik
4	Motor Kawasaki KLX 150 G	150	2016	1 Unit	Baik
5	Motor Honda MCB Win	97	2004	1 unit	Baik
6	Meja Biro	1 Biro	2008	4 bh	Baik
7	Meja ½ Biro	½ Biro	1992	8 bh	Baik
8	Meja Biasa	½ Biro	1992	3 bh	Baik
9	Meja ½ Biro	½ Biro	1999	10 bh	Baik
10	Meja ½ Biro	½ Biro	2003	1 bh	Baik
11	Meja ½ Biro	½ Biro	2006	1 bh	Baik
12	Meja Kerja ½ Biro	½ Biro	2008	2 bh	Baik
13	Kursi Biro	1 Biro	1992	3 bh	Baik
14	Kursi Putar 1 Biro	1 Biro	2008	3 bh	Baik
15	Kursi Putar	½ Biro	1992	1 bh	Baik
16	Kursi Putar Besar		1992	1 bh	Baik
17	Kursi Putar		1992	3 bh	Baik
18	Kursi Putar ½ Biro		2008	5 bh	Baik



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
BADAN KESBANGPOL KABUPATEN LAMPUNG BARAT

1	2	3	4	5	6
19	Kursi Lipat	Standart	2001	3 bh	Baik
20	Kursi Lipat	Standart	2005	4 bh	Baik
21	Kursi Rapat	Standart	2008	10 bh	Baik
22	Kursi Tamu		2007	1 set	Baik
23	Sofa/Sice		2008	1 set	Baik
24	Papan Kegiatan		1992	1 bh	Baik
25	Papan Data		1999	1 bh	Baik
26	Komputer		2007	2 bh	Baik
27	Komputer Notebook		2008	1 bh	Baik
28	Filling Kabinet Kantor		2007	2 bh	Baik
29	Filling Kabinet		2008	6 bh	Baik
30	Cermin		1992	1 bh	Baik
31	Lemari Besi		2008	6 bh	Baik
32	Mesin Tik		1999	1 bh	Baik
33	Mesin Tik		2008	1 bh	Baik
34	Brankas		2008	1 bh	Baik
35	Meja Komputer		2001	1 bh	Baik
36	Dispenser		2001	1 bh	Baik
37	Hordeng		2004	18 bh	Baik
38	Teralis		2004	31	Baik
39	Gambar Bupati/Wakil		2004	1 bh	Baik
40	Foto Presiden/Wakil		2005	1 bh	Baik
41	Foto Gubernur/Wakil		2005	1 bh	Baik
42	Pesawat Fax		2004	1 bh	Baik
43	Mesin Faximile		2008	1 bh	Baik
44	Meja Rapat		2008	1 bh	Baik
45	Lemari Buku		2008	1 bh	Baik
46	White Board		2008	1 bh	Baik
47	Papan Data Linmas		2008	1 bh	Baik
48	Papan Data Ormas & LSM		2008	1 bh	Baik
49	Komputer SIPKD	Core i-3	2010	1 unit	Baik
50	Printer SIPKD	Laser Jet	2010	1 unit	Baik
51	Komputer PC	Dual core	2012	2 unit	Baik
52	Komputer Notebook	Core i-3	2012	1 unit	Baik
53	White Board		2012	1 unit	Baik
54	Pesawat Telepon		2001	1 bh	Baik
55	Handycam		2007	1 bh	Baik
56	Wearless		2007	1 bh	Baik



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
BADAN KESBANGPOL KABUPATEN LAMPUNG BARAT

1	2	3	4	5	6
57	Standart (Tripod Corong)		2008	1 bh	Baik
58	Kamera Digital	16 MP	2012	1 unit	Baik
59	Komputer PC	Dual core	2013	1 unit	Baik
60	Lemari Arsip	Besi	2016	4 unit	Baik
61	Kursi Lipat	Besi	2016	25 unit	Baik
62	Komputer PC Build Up	Core i-3	2016	2 unit	Baik
63	Cabinet 4 laci	Besi	2017	2 unit	Baik
64	Komputer PC Build Up	Core i-3	2017	1 unit	Baik
65	Komputer Notebook/Laptop	Core i-5	2017	1 unit	Baik
66	Kursi 1 Biro	1 Biro	2017	2 unit	Baik
67	Kursi ½ Biro	½ Biro	2017	4 unit	Baik
68	Meja 1 Biro	1 Biro	2017	2 unit	Baik
69	Meja ½ Biro	½ Biro	2017	4 unit	Baik
70	Mesin Tik	Manual	2017	1 unit	Baik
71	Meja Resepsionis		2021	1 unit	Baik
72	Kursi Lipat		2021	6 unit	Baik
73	Kursi	1 Biro	2021	1 unit	Baik
74	Proyektor		2021	1 unit	Baik
75	Layar Proyektor		2021	1 unit	Baik
76	Televisi		2021	1 unit	Baik
77	Gorden		2021	24 Meter	Baik
78	Tangga Lipat		2021	1 unit	Baik
79	UPS Komputer		2021	1 Unit	Baik
80	Mic Wireless Conferece		2021	1 Unit	Baik
81	Genset		2021	1 unit	Baik
82	Laptop	Acer	2021	1 unit	Baik
83	Rak besi temple dinding		2024	7 unit	Baik
84	Meja rapat		2024	1 unit	Baik
85	Printer multi fungsi	Brother	2024	1 Unit	Baik
86	Laptop	Acer	2024	2 unit	Baik

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana kerja yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



Kabupaten Lampung Barat masih relative terbatas baik dari segi jumlah barang maupun dari segi usia/tahun perolehan asset yang sebagian besar diperoleh dibawah tahun 2013 sehingga berpengaruh pada daya dukung asset dalam mendukung kegiatan operasional kantor.

Dengan kondisi sarana prasarana yang ada tersebut sangat berpeluang untuk dilakukan pengembangan baik dari segi kuantitas maupun kualitas asset dimasa yang akan datang.

1.3. Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026.

Capaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat periode tahun 2023-2026 dapat dilihat dari capaian indikator kinerja. yaitu dengan membandingkan realisasi target indikator dengan target yang telah ditetapkan. Selain itu, capaian kinerja pelayanan juga dinilai dari perencanaan anggaran dan realisasinya selama kurun waktu 2023-2026.

Penyajian capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat pada hal ini merupakan realisasi kinerja yang telah dicapai sampai dengan tahun ke-2 (Tahun 2024) dari periode perencanaan tahun 2023-2026, hal ini merujuk pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026.

1.3.a. Capaian Indikator Kinerja

Bagian ini mengulas capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2023-2026 berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026. Capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :



**PENCAPAIAN KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2023-2026**

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN				REALIASASI CAPAIAN TAHUN				RASIO CAPAIAN PADA TAHUN (=capaian/target x 100%)			
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	Persentase Pengurangan Konflik SARA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-
2	Persentase Partisipasi Masyarakat Yang Memiliki Hak Pilih Dalam Mengikuti Pesta Demokrasi	-	86%	-	-	-	79,5%	-	-	-	92.44%	-	-
3	Persentase Organisasi masyarakat yang bermitra dengan pemerintah	5.26%	5.54%	5.82%	6.09%	6.42%	6.99%	-	-	122.5%	126.17%	-	-



Sebagaimana terlihat pada tabel diatas capaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat periode perencanaan Tahun 2023-2026 secara umum sudah menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Keberhasilan pencapaian beberapa target kinerja tersebut tidak terlepas dari dukungan berbagai hal antara lain :

- a. Sinergitas yang berhasil dijalin dengan baik oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat dengan berbagai pihak baik mitra maupun stakeholder sehingga dukungan mereka untuk mensukseskan setiap program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat terlihat.
- b. Kondusifitas Kabupaten Lampung Barat yang dapat terjaga dengan baik, karena sinergitas dengan berbagai pihak dan forum yang ada dalam mengendalikan potensi konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Lampung Barat.

Walaupun capaian indikator kinerja pada tabel diatas menunjukkan capaian kinerja yang cukup baik, namun perlu dilakukan evaluasi terhadap indikator kinerja yang digunakan, terutama mengenai kualitas indikator, apakah dapat mengukur kinerja dengan tepat dan akurat. Selain itu, indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang akan datang perlu dilakukan penyesuaian dan penyelarasan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari pemerintah pusat sebagai arah kebijakan dalam pelaksanaan kinerja dilingkungan pemerintah daerah khususnya terkait bidang urusan kesatuan bangsa dan politik, oleh karena itu perlu dibuat perencanaan strategis jangka menengah yang mempertimbangkan peluang dan tantangan yang dihadapi.

1.3.b. Realisasi Anggaran

Kinerja anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat periode 2023-2026 dapat dilihat dari rencana anggaran dan realisasinya. Perbandingan rencana anggaran dengan realisasi anggaran menurut kelompok belanja dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



**ANGGARAN DAN REALISASI PELAYANAN BADAN KESBANGPOL KABUPATEN LAMPUNG BARAT
 MENURUT PROGRAM TAHUN 2023-2026**

NO	PROGRAM	RENCANA ANGGARAN TAHUN (Rp.)				REALISASI ANGGARAN TAHUN (Rp.)				RASIO ANTARA TARGET DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN (%)			
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.568.652.000	2.829.517.200	3.115.968.920	3.445.565.812	1.785.286.418	2.042.252.193	-	-	69.50	72.18	-	-
2	Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	583.600.000	641.960.000	707.816.000	781.897.600	699.612.800	1.006.997.543	-	-	119.88	156.86	-	-
3	Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.514.708.000	2.105.634.000	1.738.212.500	1.912.033.750	15.648.700.519	23.083.286.903	-	-	1033.12	1096.26	-	-
4	Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	545.000.000	599.500.000	659.450.000	715.395.000	467.278.250	479.433.203	-	-	85.74	79.97	-	-
5	Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	1.545.000.000	1.524.500.000	1.566.950.000	1.723.645.000	386.762.940	388.646.250	-	-	25.03	25.49	-	-
6	Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1.500.000.000	1.650.000.000	1.815.000.000	1.996.500.000	1.126.146.425	4.549.731.042	-	-	75.08	275.74	-	-



Dari tabel diatas, anggaran belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat pada umumnya belum terealisasi sesuai target yang direncanakan hal ini dikarenakan kondisi kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat yang terbatas, akan tetapi pada beberapa program capaian realisasinya melebihi dari target yang direncanakan antara lain pada program :

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan, pada saat penyusunan rencana strategis pada program ini tidak mengalokasikan belanja terkait kegiatan paskibra, namun berdasarkan kebijakan dalam regulasi dari pemerintah pusat terkait kegiatan dimaksud untuk dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menangani urusan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di daerah.
2. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, pada saat penyusunan rencana strategis pada program ini tidak mengalokasikan belanja hibah kepada lembaga penyelenggara pemilihan umum dalam hal ini KPU dan Bawaslu Kabupaten Lampung Barat terkait pembiayaan untuk kegiatan Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, namun berdasarkan kebijakan dalam regulasi dari pemerintah pusat terkait belanja hibah dimaksud untuk dialihkan kepada perangkat daerah yang menangani urusan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di daerah.
3. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, pada saat penyusunan rencana strategis pada program ini tidak mengalokasikan belanja hibah kepada Polres Lampung Barat dan Kodim 0422/Lampung Barat terkait pembiayaan untuk kegiatan pengamanan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, namun berdasarkan kebijakan dari pemerintah daerah terkait belanja hibah dimaksud untuk ditempatkan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat



1.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025-2029.

Peningkatan persatuan dan kesatuan Bangsa merupakan pondasi sebagai tolak ukur bagi kelangsungan pemerintahan dan pembangunan daerah, dimana kondisi wilayah yang beragam suku, ras, agama dan budaya dapat berdampak meningkatnya potensi konflik sosial yang meningkat dan pada akhirnya dapat mengancam integrasi nasional. Dari permasalahan yang terjadi dapat diidentifikasi sebagai tantangan dan peluang yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat dalam menjalankan tugas dan fungsi antara lain :

1. Tantangan

a. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Bangsa

- 1) Menurunnya pemahaman dan pengamalan nilai Pancasila utamanya pada generasi muda yang mulai tergerus nilai-nilai budaya nasional karena pengaruh globalisasi dan digitalisasi.
- 2) Ancaman radikalisme, intoleransi, dan separatisme melalui penyebaran paham radikal melalui media sosial yang menargetkan kelompok rentan, seperti remaja dan pemuda.
- 3) Masih minimnya partisipasi masyarakat dalam program wawasan kebangsaan dikarenakan masih terbatasnya akses dan minat masyarakat terhadap program pendidikan kebangsaan.

b. Tantangan Bidang Politik dalam Negeri

- 1) Polarisasi politik di tingkat akar rumput yang berpotensi mengganggu harmoni sosial.
- 2) Partisipasi dalam pemilihan umum dan pilkada masih cenderung transaksional (politik uang) dan pragmatis, belum berbasis ideologi atau program.
- 3) Pendidikan politik kepada masyarakat, khususnya pemilih pemula dan kelompok marginal, belum dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan.
- 4) Wilayah pedesaan dan kawasan terpencil di Lampung Barat masih mengalami kesenjangan informasi politik dibandingkan wilayah perkotaan.
- 5) Jumlah Pemilih Pemula yang semakin meningkat setiap tahunnya.



c. Bidang Organisasi Kemasyarakatan

- 1) Banyaknya ormas baru yang muncul, namun tidak seluruhnya memiliki struktur organisasi yang jelas dan tidak semua memahami ketentuan hukum yang berlaku.
- 2) Banyak pengurus ormas di tingkat lokal yang belum memiliki kapasitas manajerial, administrasi, dan keterampilan organisasi yang memadai.
- 3) Masih belum terintegrasinya data keberadaan, aktivitas, dan status hukum ormas di seluruh kecamatan di Kabupaten Lampung Barat.
- 4) Masih sedikit ormas yang aktif bermitra dalam pembangunan daerah, termasuk dalam kegiatan sosial, pendidikan, kebudayaan, dan pemberdayaan masyarakat.

d. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama

- 1) Arus globalisasi, modernisasi, dan perubahan gaya hidup berpotensi melemahkan nilai-nilai gotong royong, solidaritas sosial, serta kearifan lokal masyarakat.
- 2) Meskipun kondisi Lampung Barat relatif kondusif, potensi intoleransi dan konflik berbasis agama masih ada, terutama dengan adanya provokasi dari luar melalui media sosial.
- 3) Belum optimalnya pencegahan dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Kabupaten Lampung Barat.

e. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

- 1) Terus meningkatnya potensi radikalisme di kalangan generasi muda, baik melalui media sosial maupun jaringan tertentu, berpotensi menyebabkan ancaman keamanan nasional yang mengganggu ketenteraman daerah.
- 2) Perbedaan pandangan politik, terutama dalam konteks pemilu dan pilkada, dapat memicu polarisasi sosial yang berpotensi menambah ketegangan antar kelompok masyarakat, yang akhirnya berisiko menjadi konflik terbuka.
- 3) Koordinasi yang masih kurang antara Badan Kesbangpol, aparat keamanan, ormas, dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan



penanganan konflik sosial, membuat respons terhadap potensi konflik menjadi terlambat atau tidak efektif.

- 4) Masyarakat yang masih minim kesadaran akan pentingnya kewaspadaan terhadap potensi ancaman radikalisme, intoleransi, atau konflik sosial membuat deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan sulit dilakukan.

2. Peluang

a. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Bangsa

- 1) Adanya Program/Kegiatan terkait dengan peningkatan wawasan kebangsaan, nilai-nilai Ideologi Pancasila dan Bela Negara.
- 2) Kemajuan media digital/media sosial yang dapat menjadi sarana efektif untuk kampanye nilai kebangsaan secara kreatif.
- 3) Semangat kolaborasi antar sektor antar lain lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, dan komunitas budaya yang dapat diajak kerja sama.

b. Bidang Politik dalam Negeri

- 1) Adanya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya hak pilih dan keterlibatan politik, terutama di kalangan pemuda, membuka peluang untuk mendorong partisipasi politik yang lebih sehat.
- 2) Pemanfaatan media sosial dan platform digital untuk pendidikan politik, sosialisasi pemilu, serta penyebaran informasi politik yang benar dapat dioptimalkan untuk meningkatkan literasi politik masyarakat.
- 3) Generasi muda (Gen Z dan Milenial) yang lebih melek teknologi dan kritis dapat dijadikan motor penggerak untuk mewujudkan politik yang lebih bersih, transparan, dan inovatif.
- 4) Semakin terbukanya peluang kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga penyelenggara pemilu, organisasi kepemudaan, organisasi perempuan, media, dan LSM untuk meningkatkan kualitas demokrasi lokal.

c. Bidang Organisasi Kemasyarakatan

- 1) Kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan sosial, kebudayaan, lingkungan, dan pembangunan semakin meningkat, membuka peluang bagi ormas untuk berperan lebih aktif.



- 2) Generasi muda semakin banyak yang aktif dalam komunitas kreatif, sosial, dan lingkungan, yang dapat diarahkan untuk membentuk ormas baru atau memperkuat yang sudah ada.
 - 3) Teknologi digital memberikan peluang besar bagi ormas untuk melakukan konsolidasi internal, kampanye sosial, penguatan jaringan, dan memperluas pengaruh ke masyarakat luas.
 - 4) Terbukanya peluang kerja sama antara ormas dengan pemerintah daerah.
 - 5) Adanya kebutuhan pelatihan manajemen organisasi, administrasi, keuangan, dan penguatan jejaring, memungkinkan pemerintah daerah untuk berperan sebagai fasilitator peningkatan kapasitas ormas.
- d. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama
- 1) Besarnya potensi sektor pertanian, perkebunan, pariwisata, dan ekonomi kreatif lokal memberikan peluang untuk memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat melalui program pemberdayaan berbasis potensi daerah.
 - 2) Program-program seperti Pengembangan Desa Wisata, Ketahanan Pangan, dan Pemberdayaan Ekonomi Umat menjadi peluang untuk memperkuat daya tahan ekonomi dan sosial masyarakat di tingkat lokal.
 - 3) Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian budaya daerah menjadi momentum untuk menghidupkan kembali seni tradisional, adat istiadat, bahasa daerah, serta festival budaya.
 - 4) Meningkatnya kolaborasi antar sektor antara lain pemerintah daerah, aparat penegak hukum, organisasi kemasyarakatan terkair serta lembaga pendidikan dalam memberikan pemahaman tentang bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah Kabupaten Lampung Barat.
- e. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
- 1) Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kewaspadaan dini terhadap potensi konflik dan radikalisme, dapat membuka peluang untuk membentuk jaringan pengamat masyarakat yang lebih efektif dalam deteksi dini ancaman.



- 2) Peluang untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, aparat keamanan, organisasi masyarakat, dan sektor swasta dalam penanganan konflik, serta dalam menjaga keamanan dan ketertiban sosial melalui pendekatan yang lebih holistik dan terintegrasi.
- 3) Forum-forum sosial, keagamaan, dan budaya dapat menjadi sarana efektif dalam membangun dialog antar kelompok masyarakat, sekaligus mengurangi ketegangan sosial serta memitigasi potensi konflik berbasis SARA (Suku, Agama, Ras, Antargolongan).

1.5. Kelompok Sasaran Layanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang urusan Kesatuan Bangsa dan Politik maka kelompok sasaran layanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat antara lain sebagai berikut :

- a. Pemerintah Desa
- b. Organisasi Masyarakat
- c. Lembaga Swadaya Masyarakat
- d. Partai Politik
- e. Penghayat Kepercayaan
- f. Forum Komunikasi Umat Beragama
- g. Lembaga pendidikan
- h. Lembaga Intansi vertikal

Selain sasaran kelompok layanan tersebut, dalam rangka kelancaran tugas dan fungsinya, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat juga menjalin koordinasi dengan stakeholder terkait seperti :

1. DPRD
2. Kepolisian Resort Lampung Barat
3. Komando Distrik Militer 0422/Lampung Barat
4. Kejaksaan Negeri
5. Pengadilan Negeri
6. KPU Lampung Barat
7. Bawaslu Lampung Barat
8. Lembaga Intansi vertikal.



2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis merupakan tahapan yang krusial pada penyusunan rencana strategis. Pada identifikasi permasalahan dipetakan akar masalah yang menjadi penghambat pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik periode sebelumnya. Dengan demikian, diharapkan kebijakan yang dibuat lima tahun mendatang dapat secara efektif menyelesaikan permasalahan. Permasalahan ini merupakan salah satu dasar untuk menentukan isu-isu strategis yang menjadi fokus kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik lima tahun mendatang.

Selain itu perumusan isu-isu strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat periode 2025–2029 juga berdasarkan pada telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak Tahun 2024 yang lalu.

2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat.

Berdasarkan gambaran pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat pada uraian diatas, kajian terhadap visi misi Kabupaten Lampung Barat dan kajian terhadap rencana strategis maka berikut adalah permasalahan-permasalahan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil analisa kondisi internal maupun eksternal dan disajikan pada tabel berikut :

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	2	3	4
1	Terdapat potensi melemahnya implementasi nilai-nilai Pancasila dan ancaman stabilitas politik di daerah.	Masih adanya potensi konflik yang dipicu oleh isu SARA	1. Terbatasnya akses dan minat masyarakat terhadap program pendidikan wawasan kebangsaan dan bela negara. 2. Menurunnya pemahaman dan pengamalan nilai Pancasila utamanya pada generasi muda 3. Intoleransi



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
BADAN KESBANGPOL KABUPATEN LAMPUNG BARAT

1	2	3	4
			<ol style="list-style-type: none">4. Kurangnya promosi produk unggulan dan budaya daerah dalam rangka menjaga ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.5. Maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, psikotropika dan zat adiktif lainnya di kalangan pelajar, mahasiswa, pekerja serta masyarakat umum lainnya
		Partisipasi aktiv partai politik, ormas/LSM dalam pembangunan di Kabupaten Lampung Barat masih belum optimal	<ol style="list-style-type: none">1. Kurangnya Pendidikan politik bagi kader dan masyarakat dilakukan dilakukan oleh kelembagaan politik.2. Kurangnya sumber daya kelembagaan partai politik dalam memberikan pendidikan politik kepada kader dan simpatisannya.3. Kesenjangan informasi politik antar wilayah.4. Masih kurangnya partisipasi politik masyarakat.5. Pembinaan ormas/LSM belum optimal.6. Kurangnya kesadaran ormas/LSM untuk melaporkan keberadaanya.
		Timbulya potensi konflik SARA diwilayah Kabupaten Lampung Barat	<ol style="list-style-type: none">1. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam deteksi dini dan cegah dini.2. Belum optimalnya pengawasan dan pemantauan terhadap orang asing (tenaga kerja asing) maupun lembaga asing yang berada di Kabupaten Lampung Barat.3. Belum adanya pemetaan kondisi tingkat kerawanan wilayah Kabupaten Lampung Barat.4. Masih rendahnya peran forum koordinasi didaerah dalam membantu stabilitas keamanan dan ketertiban.



2.2. Isu-Isu Strategis.

Dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi yang dimiliki serta visi, misi program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Barat hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Lampung Barat, selanjutnya diidentifikasi isu strategis sebagai berikut :

a. Pembangunan persatuan dan kesatuan masyarakat Kabupaten Lampung Barat

Harmonisasi keragaman budaya, agama, suku, ras dan tradisi menjadi aspek penting dalam membangun karena adanya aspek kemajemukan didalam masyarakat. Potensi terganggunya keamanan disebabkan oleh kondisi sosial, ekonomi dan budaya serta potensi kerawanan sosial, berkembangnya paham radikalisme/terorisme, SARA, dan mengikisnya pemahaman wawasan kebangsaan. Potensi konflik yang banyak terjadi akan meresahkan dan berakibat pudarnya rasa aman di masyarakat. Terjaminnya ketentraman dan ketertiban akan menciptakan rasa aman bagi masyarakat, merupakan jaminan bagi terlaksananya pembangunan.

b. Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat Kabupaten Lampung Barat

Terwujudnya suasana partisipasi politik masyarakat yang tinggi dalam iklim yang demokratis yang terbebas dari berbagai macam gangguan keamanan dan kondusif menjadi modal dasar dalam keberhasilan pembangunan.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Penetapan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah bagi perangkat daerah. Dalam menencapai tujuan dan sasaran tersebut dibutuhkan strategi dan kebijakan yang tepat, karena dari strategi dan arah kebijakan tersebut selanjutnya akan menjadi dasar perumusan program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat.

Tujuan dan sasaran perangkat daerah merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah. Dalam penetapan tujuan dan sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada analisis isu-isu strategis. Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun.

Adapun pernyataan visi dan misi Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025–2029 yang menjadi acuan dalam merumuskan tujuan serta sasaran adalah :

“Mewujudkan Lampung barat yang Harmonis, Elok, Berbudaya, Agamis, Taqwa, Sehat Cerdas Berbudaya, Tegak, Inovatif, Adil Makmur dan merata (LAMPUNG BARAT HEBAT DAN SETIA)”

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Lampung Barat yang :

A. HEBAT

1. **HARMONI**, Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), harmoni berarti : Pernyataan Rasa, Aksi, Gagasan, dan Minat; Keselarasan; Keserasian. Dalam rumusan visi ini, harmoni bermakna: keseimbangan atau kesesuaian, yaitu suatu keadaan pembangunan yang berkelanjutan dengan mengutamakan keseimbangan dan kesesuaian Daya Dukung Sumber Daya Alam, Sumber Daya



Manusia dan Sumber Daya Budaya yang dimiliki dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan.

2. **ELOK**, Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), elok berarti: Baik, bagus, cantik. Dalam rumusan visi ini, elok bermakna: Indah, Cantik dan Bagus, Lampung Barat yang dikurniakan Tuhan dengan kondisi alam yang elok atau indah, dan kehidupan sosial-budaya serta sosialkemasyarakatan yang berkepribadian dan berkarakter luhur menjadi modal penting dalam pelaksanaan pembangunan.
3. **BERBUDAYA**, Suatu keadaan di mana di dalam masyarakat tertanam dan terbina nilai-nilai tatanan dan norma yang luhur tanpa meninggalkan warisan budaya dan seni dan senantiasa mengapresiasi kekayaan khasanah budaya, tradisi daerah dan kearifan lokal.
4. **AMAN**, bermakna keadaan yang menggambarkan bahwa setiap orang merasakan ketenangan dan kenyamanan sehingga dapat melakukan berbagai aktivitas.
5. **TAQWA**, bermakna kepatuhan manusia kepada Sang Maha Pencipta dalam menjalankan perintah-NYA dan menjauhi larangan-NYA. Taqwa merupakan Perwujudan dari Keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan hal ini merupakan Landasan serta Sumber Motivasi dalam melaksanakan seluruh aspek Pembangunan.

B. SETIA

1. **SEHAT DAN CERDAS**, mengandung arti mewujudkan masyarakat yang sejahtera secara jasmani dan rohani maupunsosial; berkualitas, unggul dan berdaya saing yang menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), sehingga memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
2. **TEGAS DAN INOVATIF**, mengandung arti sikap yang berani dan percaya diri mengungkapkan apa yang benar dan apa yang salah secara jelas, nyata dan pasti, serta membangun proses kreatif dalam pengalaman terhadap fakta di lapangan menjadi suatu gagasan, ide, metode atau alat yang dapat bernilai menjadi lebih baik.
3. **ADIL, MAKMUR DAN MERATA**, masyarakat Kabupaten Kabupaten Lampung Barat yang dapat menikmati pembangunan secara merata.



Adapun makna Lampung Barat HEBAT DAN SETIA, “Semangat dan kebersamaan dan kesetiaan untuk Lebih Mengoptimalkan Potensi yang Ada dan Sangat Besar untuk Kesejahteraan Masyarakat secara adil dan merata.” Dalam hal ini adalah suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu masyarakat Lampung Barat; baik pangan, sandang, papan, pendidikan, maupun kesehatan dan relasi sosialnya, serta terjaga dan terlindunginya agama, harta, jiwa, akal, dan kehormatannya sebagai manusia; baik di saat sekarang maupun bagi generasi di masa akan datang; melalui pemanfaatan secara bijak atas kekayaan sumber daya alam Lampung Barat secara adil dan merata.

Dari pernyataan Visi Kabupaten Lampung Barat 2025–2029 tersebut selanjutnya di rumuskan misi yang disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Misi yang digariskan untuk pembangunan Kabupaten Lampung Barat selama 5 tahun ke depan adalah :

1) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Sehat Cerdas dan berbudaya.

Konsep Lampung Barat sehat dan cerdas sepenuhnya diemban oleh misi pertama ini. Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sehat dan terdidik dan memastikan akses kesehatan untuk rakyat agar mampu berkarya dan produktif sangat menentukan keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu misi pertama ini merupakan salah satu pondasi utama dalam mewujudkan kelima misi lainnya, yakni menyiapkan SDM Lampung Barat yang sehat, cerdas, terdidik dan terampil dan berdaya saing tinggi agar mampu berkarya dan berpartisipasi dalam proses dan percepatan pembangunan di berbagai bidang, serta memajukan dan Melestarikan kebudayaan setempat dalam semangat kebhinekaan dan toleransi serta menjaga kelestarian lingkungan hidup warisan leluhur bangsa Indonesia.

2) Ekonomi Tumbuh Secara Inklusif dan Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah berbasis potensi sumber daya lokal.

Misi ini merupakan kerangka acuan untuk memanifestasikan keempat misi lainnya, yakni meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan prinsip inklusif yang melibatkan seluruh pemangku peran dan masyarakat dengan manfaat yang dapat diakses oleh semua orang, melalui kebijakan yang



memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil-menengah yang inklusif dan kreatif.

3) Birokasi yang amanah, menjunjung tinggi hukum dan berkeadaban.

Rancangan keberhasilan seluruh misi pembangunan sangat ditentukan oleh misi ini, dengan mengusung peningkatan reformasi birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, bersih, jujur, transparan dan akuntabel yang didukung oleh sumber daya aparatur yang profesional dan sistem kelembagaan yang efektif dan efisien, serta menjamin kesetaraan dan keadilan bagi semua pihak serta membangun proses kreatif dan inovatif serta menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban.

4) Meningkatkan Kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam untuk pembangunan berkelanjutan.

Misi ini Bermakna memperbaiki pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan dan kegunaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan social ekonomi dan upaya konservasi

5) Masyarakat beriman dan bertakwa, harmonis dengan semangat bergotong royong.

Melalui tatanan kehidupan masyarakat yang agamis, aman, damai dan harmonis diharapkan mampu mendorong penciptaan iklim daerah yang kondusif untuk kelancaran pembangunan di berbagai bidang.

6) Infrastruktur mantap,

Membangun infrastruktur yang mendukung aktifitas perekonomian secara adil dan merata di seluruh wilayah.

Dari pernyataan visi dan misi Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025–2029 diatas akan menjadi dasar bagi perangkat daerah untuk menetapkan tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas dan fungsinya. Memperhatikan uraian misi diatas maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat mempunyai tanggung



jawab untuk mewujudkan pencapaian misi ke-5 yaitu : **Masyarakat beriman dan bertakwa, harmonis dengan semangat bergotong royong.**

1. Tujuan Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat.

Tujuan pembangunan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang menunjukkan hasil akhir jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta RPJMD yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, serta didasarkan pada permasalahan dan isu strategis. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa datang dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta faktor lingkungan yang mempengaruhi. Tujuan juga diselaraskan dengan rencana pembangunan yang diamanatkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dalam Bidang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan demikian maka tujuan jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025–2029 yaitu :

- Tujuan : Memperkokoh kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila dan demokrasi.
- Indikator Tujuan : Indeks Kerukunan Hidup umat beragama.
- Target Kinerja : - Tahun 2026 : 90.60 (Sangat Tinggi)
- Tahun 2027 : 90.65 (Sangat Tinggi)
- Tahun 2028 : 90.70 (Sangat Tinggi)
- Tahun 2029 : 90.75 (Sangat Tinggi)
- Tahun 2030 : 90.80 (Sangat Tinggi)

2. Sasaran Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dari tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat terukur. Indikator kinerja sasaran adalah tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Setiap indikator kinerja disertai dengan rencana tingkat capaian (target),



maka dalam penetapan sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat mengacu pada tujuan strategis yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029.

Adapun sasaran yang harus diwujudkan dalam rangka mencapai tujuan “Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila dan demokrasi” yaitu :

Sasaran : Meningkatnya kehidupan masyarakat yang harmonis dan demokratis.

Indikator Sasaran : 1. Indeks Kerukunan Hidup umat beragama

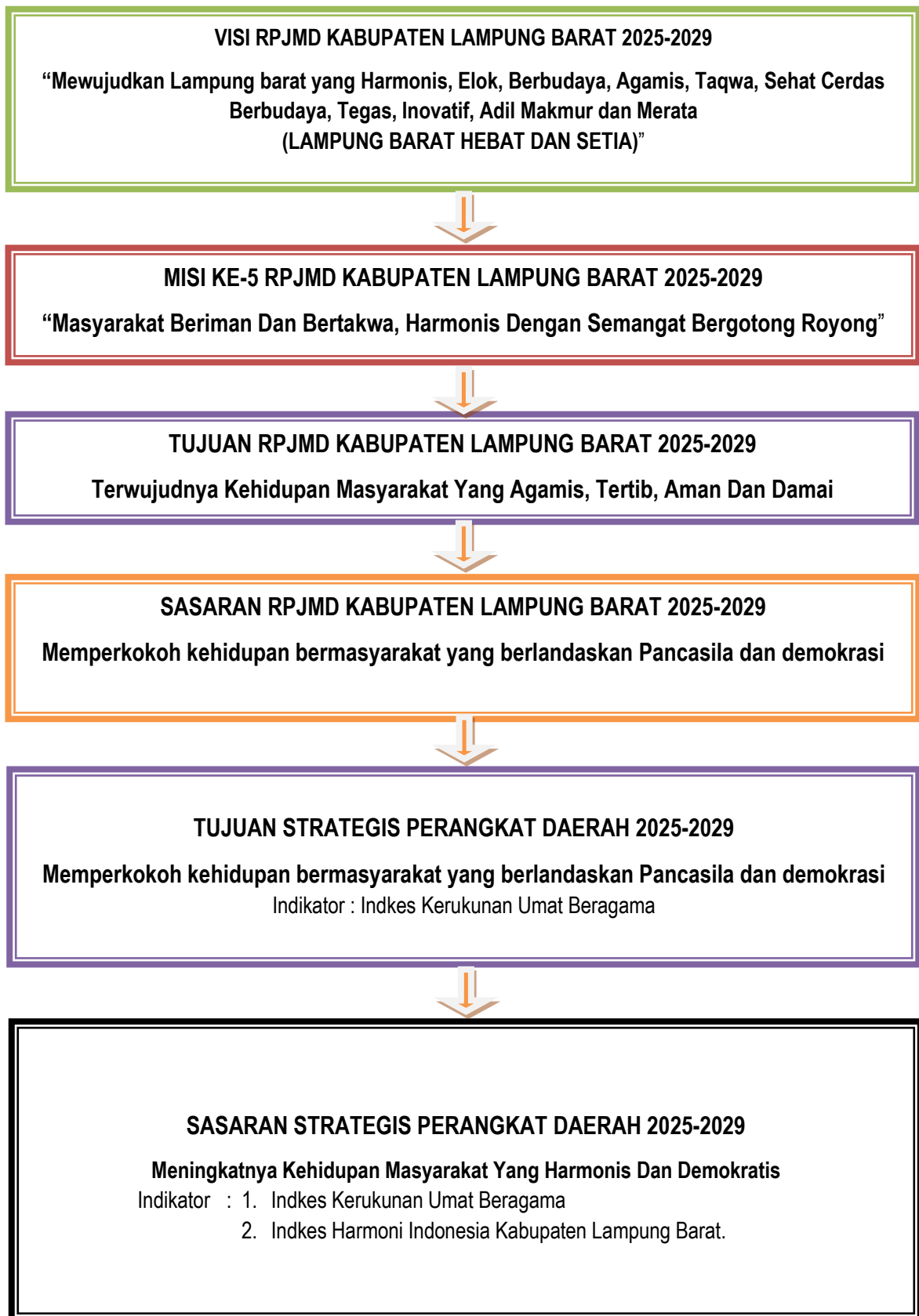
- Target Kinerja : - Tahun 2026 : 90.60 (Sangat Tinggi)
- Tahun 2027 : 90.65 (Sangat Tinggi)
- Tahun 2028 : 90.70 (Sangat Tinggi)
- Tahun 2029 : 90.75 (Sangat Tinggi)
- Tahun 2030 : 90.80 (Sangat Tinggi)

2. Indeks Harmoni Indonesia Kabupaten Lampung Barat.

- Target Kinerja : - Tahun 2026 : 6
- Tahun 2027 : 6,2
- Tahun 2028 : 6,4
- Tahun 2029 : 6,6
- Tahun 2030 : 6,8



**Gambaran Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Dengan RPJMD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025-2029.**





3. Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Perangkat Tahun 2025-2029.

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Dengan memperhatikan Tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025–2029 serta untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025–2029, berikut ini telah dirumuskan strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
2. Meningkatkan Peran partai politik dan lembaga pendidikan politik, serta etika budaya politik masyarakat.
3. Meningkatkan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan.
4. Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya.
5. Meningkatkan penyelesaian konflik di wilayah.

4. Arah Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Perangkat Tahun 2025-2029.

Berdasarkan strategi yang digunakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat dalam mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah, maka dirumuskan arah kebijakan yang meliputi :

1. Menyusun Kebijakan Teknis dan Memantapkan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan sesuai dengan tatakala.
2. Menyusun Kebijakan Teknis dan Memantapkan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik sesuai dengan tatakala.
3. Menyusun Kebijakan Teknis dan Memantapkan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan sesuai dengan tatakala.
4. Menyusun Kebijakan Teknis dan Memantapkan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya sesuai dengan tatakala.
5. Menyusun Kebijakan Teknis dan Memantapkan Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial sesuai dengan tatakala.



TUJUAN, SASARAN, STRATEGIA DAN ARAH KEBIJAKAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2025-2029

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Memperkokoh Kehidupan Bermasyarakat Yang Berlandaskan Pancasila Dan Demokrasi.	Meningkatnya Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis Dan Demokratis	1. Meningkatkan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.	1. Menyusun Kebijakan Teknis dan Memantapkan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan sesuai dengan Tatakala.
		2. Meningkatkan Peran partai politik dan lembaga pendidikan politik, serta etika budaya politik masyarakat	2. Menyusun Kebijakan Teknis dan Memantapkan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Sesuai dengan Tatakala.
		3. Meningkatkan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan.	3. Menyusun Kebijakan Teknis dan Memantapkan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Sesuai dengan Tatakala.
		4. Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya.	4. Menyusun Kebijakan Teknis dan Memantapkan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Sesuai dengan Tatakala.
		5. Meningkatkan penyelesaian konflik di wilayah.	5. Menyusun Kebijakan Teknis dan Memantapkan Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Sesuai dengan Tatakala.



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Strategi dan arah kebijakan jangka menengah memerlukan penjabaran berupa upaya-upaya dalam bentuk program, kegiatan serta penjabaran yang lebih detail yaitu dalam sub kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahun. Langkah-langkah operasional tersebut harus dituangkan kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan merupakan acuan setiap Perangkat Daerah (PD) dalam mengoperasionalkan kinerja organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

1. Program

Program merupakan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran renstra, program perangkat daerah mengacu kepada strategi dan arah kebijakan.

Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan ditentukan program beserta indikator kinerja masing-masing program pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat. Selanjutnya program yang tercantum dalam rencana strategis ini akan dilaksanakan selama lima tahun sesuai dengan periode masa berlaku renstra.

Program yang dilaksanakan pada rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat tahun 2025–2029 sebanyak enam program termasuk 1 program untuk operasional rutin kantor, yaitu :

1.a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.



Program ini digunakan untuk membiayai kegiatan operasional rutin Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan tatakala rencana strategis 2025–2029 yang meliputi belanja gaji dan tunjangan pegawai serta belanja barang dan jasa rutin kantor.

Indikator capai program ini adalah Nilai SAKIP Perangkat Daerah yang merupakan cerminan dari akuntabilitas dan kinerja pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat dengan target capaian kinerja tahunan sebagai berikut :

- Tahun 2026 : 78.40 poin
- Tahun 2027 : 78.60 poin
- Tahun 2028 : 78.80 poin
- Tahun 2029 : 79.00 poin
- Tahun 2030 : 79.20 poin

1.b. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

Program ini digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka memantapkan pelaksanaan bidang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan di Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan tatakala rencana strategis 2025–2029.

Indikator capai program ini adalah Persentase Cakupan penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan pada sekolah Tingkat SLTA yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat dengan target capaian kinerja tahunan sebagai berikut :

- Tahun 2026 : 52%
- Tahun 2027 : 70%
- Tahun 2028 : 80%
- Tahun 2029 : 90%
- Tahun 2030 : 100%

1.c. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.

Program ini digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka memantapkan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan



situasi politik di Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan tatakala rencana strategis 2025–2029.

Indikator capai program ini adalah Persentase Pendidikan Politik Pada Kader Partai Politik, capaian pendidikan politik tersebut yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat maupun lembaga partai politik yang ada di Kabupaten Lampung Barat dengan target capaian kinerja tahunan sebagai berikut :

- Tahun 2026 : 38.12%
- Tahun 2027 : 51.91%
- Tahun 2028 : 65.71%
- Tahun 2029 : 79.51%
- Tahun 2030 : 93.31%

1.d. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

Program ini digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka memantapkan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan tatakala rencana strategis 2025–2029.

Indikator capai program ini adalah Persentase Organisasi Kemasyarakatan Yang Aktif dengan sasaran pada program ini adalah Ormas/LSM yang terdata dan berkedudukan di Kabupaten Lampung Barat dengan target capaian kinerja tahunan sebagai berikut :

- Tahun 2026 : 17.48%
- Tahun 2027 : 17.95%
- Tahun 2028 : 18.41%
- Tahun 2029 : 18.88%
- Tahun 2030 : 19.35%

1.e. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya.

Program ini digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka Memantapkan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan tatakala rencana strategis 2025–2029.

Indikator capai program ini adalah Persentase Kebijakan Dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Fasilitasi Pencegahan



Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan Didaerah Yang Dilaksanakan dengan target capaian kinerja tahunan sebagai berikut :

- Tahun 2026 : 100%
- Tahun 2027 : 100%
- Tahun 2028 : 100%
- Tahun 2029 : 100%
- Tahun 2030 : 100%

1.f. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Program ini digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka Memantapkan Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan tatakala rencana strategis 2025–2029.

Indikator capai program ini adalah Persentase Konflik Sosial Yang Diselesaikan dengan target capaian kinerja tahunan sebagai berikut :

- Tahun 2026 : 100%
- Tahun 2027 : 100%
- Tahun 2028 : 100%
- Tahun 2029 : 100%
- Tahun 2030 : 100%

2. Kegiatan

Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran tujuan, visi dan misi organisasi serta untuk mengukur keberhasilan suatu program, baik kuantitatif maupun kualitatif.

Kegiatan yang dilaksanakan pada rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat tahun 2025–2029 sebanyak 13 kegiatan termasuk 8 kegiatan rutin untuk operasional rutin kantor, yaitu :

2.a. Kegiatan yang mendukung pencapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang merupakan program rutin yaitu :



- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin kantor yang diperuntukan dalam rangka pembiayaan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, penyusunan dokumen anggaran perangkat daerah dan dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah.
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin kantor yang pengalokasian anggarannya diperuntukan dalam rangka pembayaran gaji dan tunjangan pegawai yang bertugas dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat serta pembiayaan untuk kegiatan penyusunan laporan atas pelaksanaan pengelolaan keuangan perangkat daerah.
- 3). Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin kantor yang diperuntukan dalam rangka pembiayaan kegiatan administrasi pengelolaan barang milik daerah yang berada dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat.
- 4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin kantor yang diperuntukan dalam rangka pembiayaan kegiatan evaluasi kinerja pegawai dan pembiayaan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai yang bertugas dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat.
- 5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin kantor yang diperuntukan dalam rangka pembiayaan untuk penyediaan peralatan penerangan gedung kantor, pengadaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan bahan bacaan, penyediaan menu jamuan untuk tamu kantor dan penyediaan biaya untuk kegiatan koordinasi dan konsultasi bagi pegawai dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat.
- 6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin kantor yang diperuntukan dalam rangka penyediaan barang peralatan dan perlengkapan kantor guna



mendukung kegiatan operasional pelayanan perangkat daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat.

7). Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin kantor yang diperuntukan dalam rangka membayar layanan jasa kantor meliputi kegiatan administrasi surat menyurat dan pembiayaan penyediaan barang dan jasa untuk keperluan kantor antara lain layanan jasa telekomunikasi, air dan listrik serta penyediaan peralatan kantor lainnya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat.

8) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin kantor yang diperuntukan dalam rangka pemeliharaan kendaraan dinas serta peralatan dan perlengkapan kantor yang ada dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat.

2.b. Kegiatan yang mendukung pencapaian Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan yaitu melalui Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang penganggarnya digunakan untuk membiayai antara lain :

1. Kegiatan dalam rangka peningkatan wawasan kebangsaan, bela Negara penguatan ideologi pancasila.
2. Sosialisasi dan Pembinaan Paskibraka tingkat Kabupaten Lampung Barat.
3. Seleksi penerimaan calon anggota Paskibraka tingkat Kabupaten Lampung Barat.
4. Diklat pembentukan calon anggota Paskibraka tingkat Kabupaten Lampung Barat.

2.c. Kegiatan yang mendukung pencapaian Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik yaitu melalui Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta



Pemantauan Situasi Politik yang penganggarnya digunakan untuk membiayai antara lain :

1. Kegiatan dalam rangka peningkatan pemahaman masyarakat tentang peraturan perundang-undangan terkait bidang politik.
 2. Menyelenggarakan forum diskusi dan konsultasi kelembagaan politik di Kabupaten Lampung Barat.
 3. Pembinaan dan pemberdayaan partai politik di Kabupaten Lampung Barat.
- 2.d. Kegiatan yang mendukung pencapaian Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yaitu melalui Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang penganggarnya digunakan untuk membiayai antara lain :
1. Kegiatan dalam rangka pendataan Ormas/LSM yang berada di Kabupaten Lampung Barat.
 2. Menyelenggarakan forum silaturahmi Ormas/LSM yang berada di Kabupaten Lampung Barat.
 3. Pembinaan dan pemberdayaan Ormas/LSM yang berada di Kabupaten Lampung Barat.
- 2.e. Kegiatan yang mendukung pencapaian Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya yaitu melalui Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang penganggarnya digunakan untuk membiayai antara lain :
1. Kegiatan dalam rangka mendukung peningkatan ketahanan masyarakat dibidang ekonomi, sosial dan budaya melalaui promosi produk unggulan daerah maupun promosi budaya daerah pada pagelaran yang diselenggarakan diluar Kabupaten Lampung Barat.
 2. Pembinaan kepada pekon/desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) yaitu pekon/desa yang dicanangkan sebagai pekon/desa bebas dari peredaran dan penyalahgunaan Narkoba.
 3. Penyelenggaraan kegiatan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).
 4. Fasilitasi pelaksanaan koordinasi dan pemberian dana hibah kepada FKUB



Kabupaten Lampung Barat.

5. Pelaksanaan survey Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Lampung Barat.
- 2.f. Kegiatan yang mendukung pencapaian Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial yaitu melalui Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang penganggarnya digunakan untuk membiayai antara lain :
 1. Kegiatan dalam rangka meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat terhadap potensi konflik diwilayah Kabupaten Lampung Barat.
 2. Monitoring dan pemantauan wilayah terkait keberadaan orang asing, tenaga kerja asing, lembaga asing serta deteksi dini potensi konflik diwilayah Kabupaten Lampung Barat.
 3. Penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi komunitas intelejen daerah Kabupaten Lampung Barat.
 4. Fasilitasi pelaksanaan forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Lampung Barat.

3. Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sosial, politik, dan keamanan didaerah melalui berbagai sub kegiatan yang mendukung penguatan ideologi, demokrasi, dan ketahanan nasional didaerah. Sub kegiatan yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis dan partisipatif dalam proses demokrasi.

Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat tahun 2025–2029 sebanyak 42 sub kegiatan termasuk 27 kegiatan rutin untuk operasional rutin kantor.

Adapun uraian program, kegiatan dan sub kegiatan beserta kinerja, indikator dan pagu indikatif adalah sebagaimana tabel berikut :



**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN BESERTA INDIKATOR DAN PAGU INDIKATIF
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2025-202**

KODE	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	PEMERINTAHAN UMUM				6,979,93 5,857		7,657,39 8,838		8,617,881, 227		10,170,5 70,428		11,039,6 05,345	
8.1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				6,979,93 5,857		7,657,39 8,838		8,617,881, 227		10,170,5 70,428		11,039,6 05,345	
	Memperkokoh kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila dan demokrasi	Indeks Kerukunan Hidup umat beragama	90.50 Point (Sangat Tinggi)	90.60 Point (Sangat Tinggi)	6,979,93 5,857	90.65 Point (Sangat Tinggi)	7,657,39 8,838	90.70 Point (Sangat Tinggi)	8,617,881, 227	90.75 Point (Sangat Tinggi)	10,170,5 70,428	90.80 Point (Sangat Tinggi)	11,039,6 05,345	Badan Kesbang pol
	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang harmonis dan demokratis	Indeks Kerukunan Hidup umat beragama	90.50 Point (Sangat Tinggi)	90.60 Point (Sangat Tinggi)	6,979,93 5,857	90.65 Point (Sangat Tinggi)	7,657,39 8,838	90.70 Point (Sangat Tinggi)	8,617,881, 227	90.75 Point (Sangat Tinggi)	10,170,5 70,428	90.80 Point (Sangat Tinggi)	11,039,6 05,345	Badan Kesbang pol
		Indeks Harmoni Indonesia Kabupaten Lampung Barat	-	6		6.2		6.4		6.6		6.8		Badan Kesbang pol
8.01.0 1	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78.20 poin	78.40 Poin	2,615,60 1,686	78.6 Poin	2,892,16 1,855	78.8 Poin	3,404,321, 962	79 Poin	4,012,58 6,863	79.2 Poin	4,735,54 4,797	Badan Kesbang pol
8.01.0 1.1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Disusun	22 dokumen	11 dokumen	19,366,5 00	11 dokumen	21,303,1 50	11 dokumen	23,433,465	11 dokumen	25,776,8 12	11 dokumen	28,354,4 93	Badan Kesbang pol
		Jumlah Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah Yang Disusun	8 dokumen	4 dokumen	10,349,5 00	4 dokumen	11,384,4 50	4 dokumen	12,522,895	4 dokumen	13,775,1 85	4 dokumen	15,152,7 03	Badan Kesbang pol
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun	28 laporan	6 laporan	14,738,5 00	6 laporan	16,212,3 50	6 laporan	17,833,585	6 laporan	19,616,9 44	6 laporan	21,578,6 38	Badan Kesbang pol



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
BADAN KESBANGPOL KABUPATEN LAMPUNG BARAT

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8.01.0 1.1.01. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22 Dokumen	11 dokumen	19,366,500	11 dokumen	21,303,150	11 dokumen	23,433,465	11 dokumen	25,776,812	11 dokumen	28,354,493	Badan Kesbang pol
8.01.0 1.1.01. 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1 dokumen	3,392,500	1 dokumen	3,731,750	1 dokumen	4,104,925	1 dokumen	4,515,418	1 dokumen	4,966,959	Badan Kesbang pol
8.01.0 1.1.01. 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Hasil koordinasi penyusunan Dokumen perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	1 dokumen	2,499,000	1 dokumen	2,748,900	1 dokumen	3,023,790	1 dokumen	3,326,169	1 dokumen	3,658,786	Badan Kesbang pol
8.01.0 1.1.01. 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	1 dokumen	2,320,000	1 dokumen	2,552,000	1 dokumen	2,807,200	1 dokumen	3,087,920	1 dokumen	3,396,712	Badan Kesbang pol
8.01.0 1.1.01. 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	1 dokumen	2,138,000	1 dokumen	2,351,800	1 dokumen	2,586,980	1 dokumen	2,845,678	1 dokumen	3,130,246	Badan Kesbang pol
8.01.0 1.1.01. 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	2 laporan	3,782,500	2 laporan	4,160,750	2 laporan	4,576,825	2 laporan	5,034,508	2 laporan	5,537,958	Badan Kesbang pol
8.01.0 1.1.01. 07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 laporan	4 laporan	10,956,000	4 laporan	12,051,600	4 laporan	13,256,760	4 laporan	14,582,436	4 laporan	16,040,680	Badan Kesbang pol
8.01.0 1.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/Bulan	20 orang	2,040,399,286	20 orang	2,244,439,215	20 orang	2,693,327,058	20 orang	3,231,992,469	20 orang	3,878,390,963	Badan Kesbang pol
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Dokumen	1 Laporan	2,900,000	1 Laporan	3,190,000	1 Laporan	3,509,000	1 Laporan	3,859,900	1 Laporan	4,245,890	Badan Kesbang pol
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	4 Dokumen	1 Laporan	2,842,000	1 Laporan	3,126,200	1 Laporan	3,438,820	1 Laporan	3,782,702	1 Laporan	4,160,972	Badan Kesbang pol



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
BADAN KESBANGPOL KABUPATEN LAMPUNG BARAT

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	1 Laporan	2,548,000	1 Laporan	2,802,800	1 Laporan	3,083,080	1 Laporan	3,391,388	1 Laporan	3,730,527	Badan Kesbangpol
8.01.0 1.1.02. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang	20 orang	2,040,399,286	20 orang	2,244,439,215	20 orang	2,693,327,058	20 orang	3,231,992,469	20 orang	3,878,390,963	Badan Kesbangpol
8.01.0 1.1.02. 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Dokumen	1 Laporan	2,900,000	1 Laporan	3,190,000	1 Laporan	3,509,000	1 Laporan	3,859,900	1 Laporan	4,245,890	Badan Kesbangpol
8.01.0 1.1.02. 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	4 Dokumen	1 Laporan	2,842,000	1 Laporan	3,126,200	1 Laporan	3,438,820	1 Laporan	3,782,702	1 Laporan	4,160,972	Badan Kesbangpol
8.01.0 1.1.02. 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	1 Laporan	2,548,000	1 Laporan	2,802,800	1 Laporan	3,083,080	1 Laporan	3,391,388	1 Laporan	3,730,527	Badan Kesbangpol
8.01.0 1.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	1 Dokumen	7,812,000	1 Dokumen	8,593,200	1 Dokumen	9,452,520	1 Dokumen	10,397,772	1 Dokumen	11,437,549	Badan Kesbangpol
8.01.0 1.2.03. 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	1 Dokumen	7,812,000	1 Dokumen	8,593,200	1 Dokumen	9,452,520	1 Dokumen	10,397,772	1 Dokumen	11,437,549	Badan Kesbangpol
8.01.0 1.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	1 dokumen	8,346,500	1 dokumen	9,181,150	1 dokumen	10,099,265	1 dokumen	11,109,192	1 dokumen	12,220,111	Badan Kesbangpol
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	- Orang	4 Orang	28,940,000	4 Orang	31,834,000	4 Orang	35,017,400	4 Orang	38,519,140	4 Orang	42,371,054	Badan Kesbangpol



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
BADAN KESBANGPOL KABUPATEN LAMPUNG BARAT

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8.01.0 1.1.05. 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	1 dokumen	8,346,50 0	1 dokumen	9,181,150	1 dokumen	10,099,26 5	1 dokumen	11,109,19 2	1 dokumen	12,220,1 11	Badan Kesbang pol
8.01.0 1.1.05. 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas pokok dan fungsinya	- Orang	4 Orang	28,940,0 00	4 Orang	31,834,000	4 Orang	35,017,40 0	4 Orang	38,519,14 0	4 Orang	42,371,0 54	Badan Kesbang pol
8.01.0 1.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan	2 Paket	1 Paket	3,515,00 0	1 Paket	3,866,500	1 Paket	4,253,150	1 Paket	4,678,465	1 Paket	5,146,31 2	Badan Kesbang pol
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang di sediakan	4 Paket	2 Paket	22,700,0 00	2 Paket	24,970,000	2 Paket	27,467,000	2 Paket	30,213,700	2 Paket	33,235,0 70	Badan Kesbang pol
		Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang di sediakan	13 Dokumen	7 Dokumen	7,020,00 0	7 Dokumen	7,722,000	7 Dokumen	8,494,200	7 Dokumen	9,343,620	7 Dokumen	10,277,9 82	Badan Kesbang pol
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2 laporan	1 Laporan	9,588,00 0	1 Laporan	10,546,800	1 Laporan	11,601,480	1 Laporan	12,761,628	1 Laporan	14,037,7 91	Badan Kesbang pol
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 laporan	1 Laporan	100,830, 000	1 Laporan	110,913,00 0	1 Laporan	122,004,30 0	1 Laporan	134,204,73 0	1 Laporan	147,625, 203	Badan Kesbang pol
8.01.0 1.1.06. 01	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan	2 Paket	1 Paket	3,515,00 0	1 Paket	3,866,500	1 Paket	4,253,150	1 Paket	4,678,465	1 Paket	5,146,31 2	Badan Kesbang pol
8.01.0 1.1.06. 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang di sediakan	4 Paket	2 Paket	22,700,0 00	2 Paket	24,970,000	2 Paket	27,467,000	2 Paket	30,213,700	2 Paket	33,235,0 70	Badan Kesbang pol
8.01.0 1.1.06. 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang di sediakan	13 Dokumen	7 Dokumen	7,020,00 0	7 Dokumen	7,722,000	7 Dokumen	8,494,200	7 Dokumen	9,343,620	7 Dokumen	10,277,9 82	Badan Kesbang pol
8.01.0 1.1.06. 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2 laporan	1 Laporan	9,588,00 0	1 Laporan	10,546,800	1 Laporan	11,601,480	1 Laporan	12,761,628	1 Laporan	14,037,7 91	Badan Kesbang pol
8.01.0 1.1.06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 laporan	1 Laporan	100,830, 000	1 Laporan	110,913,00 0	1 Laporan	122,004,30 0	1 Laporan	134,204,73 0	1 Laporan	147,625, 203	Badan Kesbang pol



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
BADAN KESBANGPOL KABUPATEN LAMPUNG BARAT

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8.01.0 1.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	9 Unit	5 Unit	65,756,700	11 Unit	87,332,370	11 Unit	94,565,607	11 Unit	102,522,168	11 Unit	111,274,384	Badan Kesbang pol
8.01.0 1.1.07. 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	1 Unit	23,400,000	2 Unit	25,740,000	2 Unit	28,314,000	2 Unit	31,145,400	2 Unit	34,259,940	Badan Kesbang pol
8.01.0 1.1.07. 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Unit	-	-	5 Unit	15,000,000	5 Unit	15,000,000	5 Unit	15,000,000	5 Unit	15,000,000	Badan Kesbang pol
8.01.0 1.1.07. 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	4 Unit	42,356,700	4 Unit	46,592,370	4 Unit	51,251,607	4 Unit	56,376,768	4 Unit	62,014,444	Badan Kesbang pol
8.01.0 1.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 laporan	1 Laporan	1,800,000	1 Laporan	1,980,000	1 Laporan	2,178,000	1 Laporan	2,395,800	1 Laporan	2,635,380	Badan Kesbang pol
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 laporan	1 Laporan	19,620,000	1 Laporan	21,582,000	1 Laporan	23,740,200	1 Laporan	26,114,220	1 Laporan	28,725,642	Badan Kesbang pol
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 laporan	1 Laporan	46,866,900	1 Laporan	51,553,590	1 Laporan	56,708,949	1 Laporan	62,379,844	1 Laporan	68,617,828	Badan Kesbang pol
8.01.0 1.1.08. 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 laporan	1 Laporan	1,800,000	1 Laporan	1,980,000	1 Laporan	2,178,000	1 Laporan	2,395,800	1 Laporan	2,635,380	Badan Kesbang pol
8.01.0 1.1.08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 laporan	1 Laporan	19,620,000	1 Laporan	21,582,000	1 Laporan	23,740,200	1 Laporan	26,114,220	1 Laporan	28,725,642	Badan Kesbang pol
8.01.0 1.1.08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 laporan	1 Laporan	46,866,900	1 Laporan	51,553,590	1 Laporan	56,708,949	1 Laporan	62,379,844	1 Laporan	68,617,828	Badan Kesbang pol
8.01.0 1.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	27 Unit	12 Unit	199,662,800	13 Unit	219,629,080	13 Unit	241,591,988	13 Unit	265,751,187	13 Unit	292,326,305	Badan Kesbang pol



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
BADAN KESBANGPOL KABUPATEN LAMPUNG BARAT

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8.01.0 1.1.09. 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	5 Unit	94,650,0 00	6 Unit	104,115,00 0	6 Unit	114,526,50 0	6 Unit	125,979, 150	6 Unit	138,577, 065	Badan Kesbang pol
8.01.0 1.1.09. 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	6 Unit	10,512,8 00	6 Unit	11,564,080	6 Unit	12,720,488	6 Unit	13,992,5 37	6 Unit	15,391,7 90	Badan Kesbang pol
8.01.0 1.1.09. 09	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	1 Unit	94,500,0 00	1 Unit	103,950,00 0	1 Unit	114,345,00 0	1 Unit	125,779, 500	1 Unit	138,357, 450	Badan Kesbang pol
8.01.0 2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Cakupan penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan pada sekolah Tingkat SLTA	33 %	52 %	1,138,55 3,018	70 %	1,252,408,3 20	80 %	1,377,649, 152	90 %	1,515,41 4,067	100 %	1,666,95 5,474	Badan Kesbang pol
8.01.0 2.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	150 Orang	100 Orang	81,537,0 00	150 Orang	89,690,700	150 Orang	98,659,770	150 Orang	108,525, 747	150 Orang	119,378, 322	Badan Kesbang pol
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	180 Orang	100 Orang	72,562,0 00	150 Orang	79,818,200	150 Orang	87,800,020	150 Orang	96,580,0 22	150 Orang	106,238, 024	Badan Kesbang pol
		Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasi Pembinaan Purnapaskibraka	2 Laporan	1 Laporan	233,468, 000	1 Laporan	256,814,80 0	1 Laporan	282,496,28 0	1 Laporan	310,745, 908	1 Laporan	341,820, 499	Badan Kesbang pol
		Jumlah Paskibraka	100 Orang	50 Orang	750,986, 018	50 Orang	826,084,62 0	50 Orang	908,693,08 2	50 Orang	999,562, 390	50 Orang	1,099,51 8,629	Badan Kesbang pol



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
BADAN KESBANGPOL KABUPATEN LAMPUNG BARAT

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8.01.0 2.2.01. 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinika Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	150 Orang	100 Orang	81,537,0 00	150 Orang	89,690,700	150 Orang	98,659,770	150 Orang	108,525, 747	150 Orang	119,378, 322	Badan Kesbang pol
8.01.0 2.2.01. 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	180 Orang	100 Orang	72,562,0 00	150 Orang	79,818,200	150 Orang	87,800,020	150 Orang	96,580,0 22	150 Orang	106,238, 024	Badan Kesbang pol
8.01.0 2.2.01. 07	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasi Pembinaan Purnapaskibraka	2 Laporan	1 Laporan	233,468, 000	1 Laporan	256,814,80 0	1 Laporan	282,496,28 0	1 Laporan	310,745, 908	1 Laporan	341,820, 499	Badan Kesbang pol
8.01.0 2.2.01. 08	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	100 Orang	50 Orang	750,986, 018	50 Orang	826,084,62 0	50 Orang	908,693,08 2	50 Orang	999,562, 390	50 Orang	1,099,51 8,629	Badan Kesbang pol
8.01.0 3	PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase pendidikan politik pada kader partai politik	25.97 %	38.12 %	902,993, 253	51.91 %	993,292,57 8	65.7%	1,092,621, 836	79.51 %	1,651,88 4,020	93.30 %	1,322,07 2,422	Badan Kesbang pol
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	370 Orang	260 Orang	161,206, 000	260 Orang	177,326,60 0	260 Orang	195,059,26 0	260 Orang	214,565, 186	260 Orang	236,021, 705	Badan Kesbang pol



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
BADAN KESBANGPOL KABUPATEN LAMPUNG BARAT

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	20 Laporan	1 Laporan	741,787,253	1 Laporan	815,965,978	1 Laporan	897,562,576	1 Laporan	987,318,834	1 Laporan	1,086,050,717	Badan Kesbang pol
8.01.0 3.2.01. 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	370 Orang	260 Orang	161,206,000	260 Orang	177,326,600	260 Orang	195,059,260	260 Orang	214,565,186	260 Orang	236,021,705	Badan Kesbang pol
8.01.0 3.2.01. 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	20 Laporan	1 Laporan	741,787,253	1 Laporan	815,965,978	1 Laporan	897,562,576	1 Laporan	987,318,834	1 Laporan	1,086,050,717	Badan Kesbang pol



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
BADAN KESBANGPOL KABUPATEN LAMPUNG BARAT

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8.01.04	PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	%	17.48 %	510,294,000	17.95 %	564,857,900	18.41 %	625,408,365	18.88 %	692,623,578	19.35 %	767,261,468	Badan Kesbang pol
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	1 Dokumen	35,255,000	1 Dokumen	40,543,250	1 Dokumen	46,624,738	1 Dokumen	53,618,448	1 Dokumen	61,661,215	Badan Kesbang pol
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	176 Orang	100 Orang	439,604,000	120 Orang	483,564,400	130 Orang	531,920,840	140 Orang	585,112,924	150 Orang	643,624,216	Badan Kesbang pol
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	0 Laporan	1 Laporan	35,435,000	1 Laporan	40,750,250	1 Laporan	46,862,788	1 Laporan	53,892,206	1 Laporan	61,976,036	Badan Kesbang pol
8.01.04.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	1 Dokumen	35,255,000	1 Dokumen	40,543,250	1 Dokumen	46,624,738	1 Dokumen	53,618,448	1 Dokumen	61,661,215	Badan Kesbang pol
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	176 Orang	100 Orang	439,604,000	120 Orang	483,564,400	130 Orang	531,920,840	140 Orang	585,112,924	150 Orang	643,624,216	Badan Kesbang pol



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
BADAN KESBANGPOL KABUPATEN LAMPUNG BARAT

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8.01.0 4.2.01. 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	- Laporan	1 Laporan	35,435,0 00	1 Laporan	40,750,250	1 Laporan	46,862,788	1 Laporan	53,892,2 06	1 Laporan	61,976,0 36	Badan Kesbang pol
8.01.0 5	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Persentase kebijakan dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan didaerah yang dilaksanakan	100%	100%	408,276, 200	100%	469,517,63 0	100%	539,945,27 5	100%	620,937, 066	100%	714,077, 626	Badan Kesbang pol
8.01.0 5.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	80 Orang	500 Orang	184,704, 600	500 Orang	212,410,29 0	500 Orang	244,271,83 4	500 Orang	280,912, 609	500 Orang	323,049, 500	Badan Kesbang pol
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	190 Orang	160 Orang	130,868, 000	160 Orang	150,498,20 0	160 Orang	173,072,93 0	160 Orang	199,033, 870	160 Orang	228,888, 950	Badan Kesbang pol
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2 Laporan	1 Laporan	92,703,6 00	1 Laporan	106,609,14 0	1 Laporan	122,600,51 1	1 Laporan	140,990, 588	1 Laporan	162,139, 176	Badan Kesbang pol



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
BADAN KESBANGPOL KABUPATEN LAMPUNG BARAT

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8.01.0 5.2.01. 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	80 Orang	500 Orang	184,704, 600	500 Orang	212,410,29 0	500 Orang	244,271,83 4	500 Orang	280,912, 609	500 Orang	323,049, 500	Badan Kesbang pol
8.01.0 5.2.01. 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	190 Orang	160 Orang	130,868, 000	160 Orang	150,498,20 0	160 Orang	173,072,93 0	160 Orang	199,033, 870	160 Orang	228,888, 950	Badan Kesbang pol
8.01.0 5.2.01. 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2 Laporan	1 Laporan	92,703,6 00	1 Laporan	106,609,14 0	1 Laporan	122,600,51 1	1 Laporan	140,990, 588	1 Laporan	162,139, 176	Badan Kesbang pol
8.01.0 6	PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	100 %	100 %	1,404,21 7,700	100 %	1,485,160, 555	100 %	1,577,934, 638	100 %	1,677,12 4,834	100 %	1,833,69 3,559	Badan Kesbang pol



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
BADAN KESBANGPOL KABUPATEN LAMPUNG BARAT

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8.01.06 .2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	50 Orang	100 Orang	91,451,600	100 Orang	105,169,340	100 Orang	120,944,741	100 Orang	139,086,452	100 Orang	159,949,420	Badan Kesbang pol
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	22 Laporan	1 Laporan	156,514,100	1 Laporan	179,991,215	1 Laporan	206,989,897	1 Laporan	238,038,382	1 Laporan	273,744,139	Badan Kesbang pol
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	7 Dokumen	1 Dokumen	1,156,252,000	1 Dokumen	1,200,000,000	1 Dokumen	1,250,000,000	1 Dokumen	1,300,000,000	1 Dokumen	1,400,000,000	Badan Kesbang pol
8.01.06 .2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	50 Orang	100 Orang	91,451,600	100 Orang	105,169,340	100 Orang	120,944,741	100 Orang	139,086,452	100 Orang	159,949,420	Badan Kesbang pol



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
BADAN KESBANGPOL KABUPATEN LAMPUNG BARAT

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8.01.06 .2.01.0 5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	22 Laporan	1 Laporan	156,514, 100	1 Laporan	179,991, 215	1 Laporan	206,989,89 7	1 Laporan	238,038, 382	1 Laporan	273,744, 139	Badan Kesbang pol
8.01.06 .2.01.0 6	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	7 Dokumen	1 Dokumen	1,156,25 2,000	1 Dokumen	1,200,00 0,000	1 Dokume n	1,250,000, 000	1 Dokumen	1,300,00 0,000	1 Dokumen	1,400,00 0,000	Badan Kesbang pol



4. Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.

Pada rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025–2029 tidak terdapat sub kegiatan yang secara langsung mendukung program prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025-2029. Hal ini dimungkinkan karena saat ini prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berfokus pada pencapaian target Indeks Pembangunan Manusia, penguatan sektor pertanian dan perkebunan, pengembangan pariwisata, pemantapan infrastruktur dasar, serta pengentasan kemiskinan dan penanganan stunting.

Disamping itu sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat lebih bersifat rutin dan administratif, seperti fasilitasi ormas, pembinaan ideologi Pancasila, deteksi dini potensi konflik, serta pelaksanaan pendidikan politik masyarakat. Meskipun penting dalam konteks ketahanan ideologi dan stabilitas sosial-politik daerah, kegiatan tersebut belum diarahkan secara strategis untuk mendorong pencapaian target prioritas pembangunan daerah secara langsung.

Kedepan, diperlukan penyesuaian dan sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik agar lebih mendukung prioritas pembangunan daerah, antara lain melalui peningkatan peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menciptakan kondisi kondusif bagi investasi, mendorong partisipasi politik yang sehat dalam pembangunan, serta memperkuat kelembagaan masyarakat sipil yang dapat berkontribusi pada pembangunan di sektor-sektor prioritas.

5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Rentra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat.

Bidang urusan yang diemban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah urusan kesatuan bangsa dan politik. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan merupakan ringkasan dari indikator kinerja yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya. Bagian ini bertujuan untuk menunjukkan keselarasan indikator rencana strategis dengan indikator kinerja program yang telah ditetapkan dalam Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025-2029.

Ukuran kinerja merupakan instrumen pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Selain itu, instrumen tersebut juga akan digunakan sebagai sarana pengendalian dan evaluasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka memperbaiki kelemahan dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat yang dituangkan dalam rencana strategis ini merupakan indikator yang telah ditetapkan melalui proses penelaahan tujuan, sasaran, sampai dengan arah kebijakan RPJMD dan rencana strategis. Hal ini sebagai perwujudan komitmen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD selama lima tahun ke depan.

Adapun Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat yang menjadi tolok ukur keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029, sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2025-2029

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat Yang Berlandaskan Pancasila Dan Demokrasi.	-	Indkes Kerukunan Umat Beragama	90.60 (Sangat Tinggi)	90.65 (Sangat Tinggi)	90.70 (Sangat Tinggi)	90.75 (Sangat Tinggi)	90.80 (Sangat Tinggi)
	Meningkatnya Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis Dan Demokratis	Indkes Kerukunan Umat Beragama	90.60 (Sangat Tinggi)	90.65 (Sangat Tinggi)	90.70 (Sangat Tinggi)	90.75 (Sangat Tinggi)	90.80 (Sangat Tinggi)
		Indkes Harmoni Indonesia Kabupaten Lampung Barat	6	6.2	6.4	6.6	6.8



6. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Bidang urusan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak termasuk dalam Indikator Kinerja Kunci untuk mengukur target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, oleh karena itu pada tatakala rencana strategis tahun 2025-2029 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat tidak menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK).



BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman arah kebijakan dan rencana kerja jangka menengah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum dibidang kesatuan bangsa dan politik. Dokumen ini merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025–2029 dan selaras dengan kebijakan nasional serta dinamika lokal yang berkembang.

Dalam Renstra ini telah dituangkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program, kegiatan hingga sub kegiatan yang akan dijalankan dalam kurun lima tahun mendatang. Seluruh rumusan tersebut disusun berdasarkan analisis kondisi aktual, evaluasi kinerja sebelumnya, serta mempertimbangkan potensi dan tantangan yang dihadapi daerah, khususnya dalam menjaga stabilitas politik, meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, memperkuat ketahanan ideologi, serta mendukung kondusivitas daerah dalam rangka mendukung pembangunan.

Renstra ini juga menjadi komitmen Badan Kesbangpol untuk terus meningkatkan akuntabilitas kinerja, memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, serta memastikan bahwa setiap program dan kegiatan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan berkontribusi terhadap terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis, dan berkeadaban.

Akhirnya, dokumen ini diharapkan menjadi acuan utama dalam penyusunan rencana kerja tahunan (Renja) dan penganggaran, sekaligus sebagai alat evaluasi dan kontrol dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah sesuai tatakala. Dengan dukungan seluruh pihak, pelaksanaan Rencana Strategis ini diharapkan mampu membawa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat menjadi institusi yang profesional, responsif, dan strategis dalam menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa di tingkat daerah.

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,**

BURLIANTO EKA PUTRA, S.H.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197109241998031005